

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1 Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Provinsi Jambi melaksanakan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja antar daerah dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

Adapun kebijakan kerjasama antar daerah di Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun rencana lainnya.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, merupakan lanjutan kerjasama yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya baik berupa kerjasama regional maupun kerjasama antar provinsi untuk sektor tertentu. Kerjasama – kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera yang pada tahun 2013 dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam forum tersebut, para Gubernur se-wilayah Sumatera bersepakat untuk :

- a. Mendorong pemerintah daerah menuju kemandirian dan keamanan pangan.
- b. Mendorong peran pemerintah dan swasta untuk membangun kawasan industri hilir sesuai potensi daerah
- c. Menetapkan pelaksanaan "Visit Sumatera 2015"
- d. Mendorong semua provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sumatera untuk melakukan kerjasama pengembangan ekonomi
- e. Memperkuat manajemen pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing Provinsi dalam penanggulangan bencana
- f. Mendukung Provinsi Aceh dan/atau Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020.

Selain kesepakatan – kesepakatan di atas, forum ini juga membuat satu kesepakatan bersama antara para gubernur se-wilayah Sumatera dengan rektor - rektor Perguruan Tinggi se-Wilayah Sumatera sebagai tindak lanjut kesepakatan tahun sebelumnya untuk mengembangkan *center of excellence* pada perguruan tinggi negeri se-Sumatera.

- 2) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. Perjanjian kerjasama ini telah ditandatangani pada tahun 2011 lalu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tahun 2013 merupakan tahun kedua implementasi perjanjian tersebut. Hal – hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebagai implementasi tersebut adalah pematangan rencana *Visit and Sail to Karimata 2015*. Keempat provinsi telah menetapkan Provinsi Kepulauan Riau

sebagai lokasi puncak acara *Sail to Karimata* dan provinsi lain sebagai tempat-tempat transit *yacht*. Sementara untuk pelaksanaan visit direncanakan selama satu tahun selama tahun 2015. Surat dukungan dan proposal kepada kementerian/ lembaga terkait untuk pelaksanaan rencana tersebut telah disiapkan dan dikirimkan pada awal tahun 2014.

- 3) Kerjasama Daerah di bidang Ketrasmigrasian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun tujuan dilaksanakan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi. Pada tahun kedua implementasi kerjasama ini telah dilakukan komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera belum optimal dalam pelaksanaan implementasinya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya badan kerjasama khusus yang menangani atau melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dan masih dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah belum terlalu fokus melaksanakan hasil kesepakatan karena tidak semua daerah memiliki fokus pembangunan yang sama, sehingga lebih mendahulukan agenda pembangunannya masing-masing.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada implementasi kerjasama tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata.

Solusinya adalah pelaksanaan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu untuk memonitoring dan mengevaluasi progress pelaksanaan kesepakatan.

2. Dukungan APBD Provinsi Jambi terhadap pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum memadai. Solusinya adalah melibatkan Kabupaten yang berada pada kawasan pesisir, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur untuk ikut berperan aktif dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata.
3. Dalam kerjasama daerah bidang ketransmigrasian tidak ditemukan kendala karena kerjasama ini merupakan lanjutan kerjasama pada tahun sebelumnya.

6.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama daerah antara Provinsi Jambi dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 sebagian besar adalah implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat para pihak pada tahun sebelumnya, yaitu kerjasama penelitian, penyelidikan dan pengembangan di Bidang Kegeologian; Kerjasama pengembangan lahan pangan berkelanjutan; kerjasama bidang pendidikan. Untuk peningkatan kualitas pendidikan dan perencanaan

pembangunan daerah di Provinsi Jambi, pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jambi 2013 telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dan telah dituangkan dalam suatu nota kesepahaman bersama. Selain bidang pendidikan, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi, maka Gubernur Jambi atas nama Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menandatangani MoU dengan POSCO ICT dan ECOSIAN.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 baik lanjutan kerjasama tahun sebelumnya dan kerjasama baru adalah sebagai berikut;

- 1) Kerjasama tentang penelitian, penyelidikan dan pengembangan di Bidang Kegeologian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari kerjasama ini, pada tahun 2013 telah diselesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi usulan Geopark Merangin sebagai *World Heritage* yang selanjutnya dikirimkan ke UNESCO.
- 2) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI tentang pengembangan lahan pangan berkelanjutan pada Daerah Irigasi Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Tujuan kerjasama adalah menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah irigasi Batang Asai seluas 6.210 Ha sebagai salah satu sumber utama produksi beras nasional untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Pada tahun 2013, kegiatan yang dilakukan adalah komunikasi dengan masyarakat yang lahannya masuk ke dalam rencana daerah irigasi Batang Asai.

- 3) Di bidang pendidikan dan peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM), Pada tahun 2013 dilakukan implementasi lanjutan kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Universitas Indonesia, antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Manajemen Transportasi Trisakti. Untuk tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan BAPPENAS, pada tahun 2013 SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi telah diikutsertakan dalam beberapa Diklat yang dilaksanakan oleh BAPPENAS. Sementara untuk kerjasama dengan Universitas Indonesia, pada tahun 2013 telah difasilitasi calon – calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan kuliah di universitas tersebut. Untuk kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2013 telah dilakukan penyusunan fakta dan analisa tiga kawasan strategis Provinsi sebagaimana telah diatur dalam RTRW Provinsi Jambi.
- 4) Kerjasama persiapan dan pelaksanaan program *Compact Proyek Green Prosperity* telah ditandatangani nota kesepahamannya pada tanggal delapan November tahun 2012 antara Lembaga Wali amanat *Millenium Challenge Account* – Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta antara Lembaga Wali amanat *Millenium Challenge Account* – Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah

Kabupaten Merangin. Proyek green prosperity ini adalah salah satu kegiatan dalam program compact yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam. Pada tahun 2013 telah terbentuk Stakeholders Forum (Forum Multifihak) di kedua kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan kerjasama. Selain itu, pada tahun 2013 juga telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga diketahui dampak yang timbul apabila proyek *Green Prosperity* ini dilaksanakan.

- 5) Kerjasama di bidang energi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan POSCO ICT dan ECOSIAN yang ditandatangani pada tanggal 13 September 2013 bertujuan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dalam pembangunan PLTG dengan kapasitas 900 MW, termasuk pengembangan ESS di Provinsi Jambi. Untuk tahun 2013, pihak POSCO ICT telah memulai penyusunan studi kelayakan untuk pembangunan PLTG dimaksud.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga ini, kecuali tahapan pembebasan lahan yang sedang dilakukan untuk pengembangan lahan pangan berkelanjutan pada Daerah Irigasi Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Upaya-upaya komunikasi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan belum berhasil secara maksimal

dan dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih intensif dengan masyarakat agar wilayah yang ditetapkan sebagai daerah irigasi mendapatkan dukungan dari masyarakat.

6.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

6.3.1 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Jambi

Pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada Kantor Wilayah Kemnterian Hukum dan HAM Jambi pada Tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai sebesar Rp. 8.469.467.000,00 Dengan kinerja kegiatan outcome tersusunanya perencanaan pembangunan yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehab Gedung Kantor

Pelaksanaan kegiatan rehab gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp.1.975.231.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.856.717.140,00 atau sebesar 94%

2. Kegiatan LP Klas III Sarolangun dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembangunan Pagar Ornames Steril Area Pelaksanaan Pembangunan Pagar Ornames Steril Area dengan anggaran sebesar Rp.1.923.515.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.711.928.350,00 atau sebesar 89%

b. Penataan Lingkungan LP

Pelaksanaan Penataan Lingkungan LP dengan anggaran sebesar Rp.1.111.709.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 978.303.920,00 atau sebesar 88%

c. Pembangunan Poliklinik

Pelaksanaan Pembangunan Poliklinik dengan anggaran sebesar Rp.1.378.213.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.212.827.440,00 atau sebesar 88%

3. LP Khusus Khusus Narkotika Klas III Muara Sabak dengan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor ke-2

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor ke-2 dengan anggaran sebesar Rp.2.080.799.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.789.487.140,00 atau sebesar 86%

6.3.2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dibiayai oleh dana APBN dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara/Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah, kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran

di Wilayah dengan dana sebesar Rp 8.731.583.000,00
Pencapaian realisasi anggaran pada program ini
sebesar Rp 7.674.841.905,00 atau 87,90 % Dengan
kinerja program outcome terwujudnya peningkatan
pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional,
transparan dan akuntabel dengan kegiatan

1. Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan
Perkantoran dengan dana sebesar
Rp.6.867.632.000,00. Pencapaian realisasi anggaran
pada kegiatan ini sebesar RP. 6.122.879.218,00
Dengan kinerja kegiatan outcome terselenggaranya
pembayaran gaji, tunjangan, terlaksananya layanan
operasional pemeliharaan perkantoran

2. Belanja Barang

a. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Belanja
Barang

dengan dana sebesar Rp. 88.000.000,00
Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini
sebesar Rp. 88.000.000,00 atau 100%

b. Gedung dan Bangunan dengan dana sebesar Rp.
788.340.000,00 Pencapaian realisasi anggaran
pada kegiatan ini sebesar Rp. 785.314.975,00
atau 99,62%

3. Pembinaan dan penyusunan laporan

a. Pembinaan dan monnev terkait pembinaan
perbendaharaan serta laporan keuangan
pemerintah pusat tingkat wilayah dengan dana

sebesar Rp 643.959.000,- Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 473.990.687,-, atau 73,61%

- b. Laporan pelaksanaan anggaran dengan dana sebesar Rp 343.652.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 204.657.025,00 atau 59,56%.

6.3.3 Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilakukan pada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas di Provinsi Jambi dibiayai oleh dana APBN dengan dana sebesar Rp 8.671.715.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 8.272.816.110,- atau 95,40% Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi pengelolaan resort

Penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan evaluasi pengelolaan resort dengan dana sebesar Rp.57.314.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100% Dengan kinerja kegiatan outcome Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan kolaboratif taman nasional berbasis resort sebanyak 6 resort

2. Studi Banding Resort Based Management di Balai Taman Nasional Alas Purwo

Penyelenggaraan kegiatan Studi Banding Resort Based Management di Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan dana sebesar Rp.58.479.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,44%

3. Pengendalian pengelolaan kawasan

Penyelenggaraan kegiatan Pengendalian pengelolaan kawasan dengan dana sebesar Rp.736.370.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 92.05%,

4. Inventarisasi Area Perladangan

Penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi Area Perladangan dengan dana sebesar Rp.79.250.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

5. Monitoring dan evaluasi efektifitas penggunaan bantuan ekonomi

Penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan evaluasi efektifitas penggunaan bantuan ekonomi dengan dana sebesar Rp 135.215.000,- Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 97,83%

6. Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah

Penyelenggaraan kegiatan Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah dengan dana sebesar Rp 67.650.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

7. Sensus Penduduk Suku Anak Dalam

Penyelenggaraan kegiatan Sensus Penduduk Suku Anak Dalam dengan dana sebesar Rp 83.161.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 95,44%

8. Reintroduksinya Anggrek

Penyelenggaraan kegiatan Reintroduksinya Anggrek dengan dana sebesar Rp 13.945.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

9. Identifikasi flora dan fauna Endemik

Penyelenggaraan kegiatan Identifikasi flora dan fauna endemik dengan dana sebesar Rp 13.970.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

10. Inventarisasi flora dan fauna Endemik

Penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi flora dan fauna endemik dengan dana sebesar Rp 103.017.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

11. Monitoring Satwa Liar

Penyelenggaraan kegiatan Monitoring Satwa Liar dengan dana sebesar Rp 77.245.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,63%

12. Inventarisasi Kebun Bibit Flora Jenis Endemik

Penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi Kebun Bibit Flora Jenis Endemik dengan dana sebesar Rp 13.945.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

13. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Anggrek dan Tanaman Obat

Penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Anggrek dan Tanaman Obat dengan dana sebesar Rp 94.041.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 98,56%

14. Pemeliharaan Jenis Tanaman Anggrek dan Obat

Penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Anggrek dan Tanaman Obat dengan dana sebesar Rp 94.041.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 98,56%

15. Patroli Pengamanan Hutan
Penyelenggaraan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dengan dana sebesar Rp 342.180.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 98,59%

16. Operasional Pengamanan Hutan
Fungsional
Penyelenggaraan kegiatan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional dengan dana sebesar Rp 66.930.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

17. Operasi Intelijen Penyelenggaraan kegiatan Operasi Intelijen dengan dana sebesar Rp 22.960.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 75% Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Penyel

18. Penyelenggaraan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan dengan dana sebesar Rp 48.445.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100% Penyelesaian Kasus Hukum

19. Penyelenggaraan kegiatan Penyelesaian Kasus Hukum dengan dana sebesar Rp 48.445.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

20. Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut dengan dana sebesar Rp 55.969.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,64%

21. Posko Siaga Kebakaran Hutan

Penyelenggaraan kegiatan Posko Siaga Kebakaran Hutan dengan dana sebesar Rp 31.500.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

22. Masyarakat Mitra Polhut dan Banpolhut

Penyelenggaraan kegiatan Administrasi Masyarakat Mitra Polhut dan Banpolhut dengan

dana sebesar Rp 423.570.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada Mkegiatan ini sebesar 99,87%

23. Monitoring Daerah Rawan Kebakaran

Penyelenggaraan kegiatan Monitoring Daerah Rawan Kebakaran dengan dana sebesar Rp 38.205.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 97,80%

24. Pelatihan SIG Pemetaan Kebakaran Hutan

Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan SIG Pemetaan Kebakaran Hutan dengan dana sebesar Rp 22.220.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

25. Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

Penyelenggaraan kegiatan Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dengan dana sebesar Rp 71.820.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,81%

26. Groundcheck Titik Api

Penyelenggaraan kegiatan Groundcheck Titik Api dengan dana sebesar Rp 12.985.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 97,69%

27. Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan

Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dengan dana sebesar Rp

67.625.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 95,71%

28. Pembinaan Masyarakat Peduli Api

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Masyarakat Peduli Api dengan dana sebesar Rp 44.790.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,78%

29. In House Training Pengendalian Kebakaran

Penyelenggaraan kegiatan In House Training Pengendalian Kebakaran dengan dana sebesar Rp 40.510.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 98,98%

30. Inventarisasi Pemanfaatan Jasa Air

Penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi Pemanfaatan Jasa Air dengan dana sebesar Rp 13.933.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

31. Inventarisasi Area Camping Ground

Penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi Area Camping Ground dengan dana sebesar Rp 34.287.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 92,97%

32. Pembinaan Kader Konsenvasi

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kader Konsenvasi dengan dana sebesar Rp 62.350.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,15%

33. Pendidikan Konservasi

Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Konservasi dengan dana sebesar Rp 71.820.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,81%

34. Penyuluhan Konservasi Kepada Masyarakat Desa dan SAD

Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Konservasi Kepada Masyarakat Desa dan SAD dengan dana sebesar Rp 76.025.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 98,65%

35. Pengenalan Konservasi

Penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Konservasi dengan dana sebesar Rp 44.385.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

36. Pameran Konservasi

Penyelenggaraan kegiatan Pameran Konservasi dengan dana sebesar Rp 76.912.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

37. Lomba Cinta Alam

Penyelenggaraan kegiatan Lomba Cinta Alam dengan dana sebesar Rp 75.490.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 97,07%

38. Pembuatan Buletin

Penyelenggaraan kegiatan Pembuatan Buletin dengan dana sebesar Rp 28.360.000,00 Pencapaian

realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 98,94%

39. Pembuatan Kalender

Penyelenggaraan kegiatan Pembuatan Kalender dengan dana sebesar Rp 21.000.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

40. Pembuat Leaflet

Penyelenggaraan kegiatan Pembuat Leaflet dengan dana sebesar Rp 4.840.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

41. Sistem Informasi Kepegawaian

Penyelenggaraan kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian dengan dana sebesar Rp 2.550.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

42. Pembayaran Hagi, Honorarium dan Vakasi

Penyelenggaraan kegiatan Pembayaran Hagi, Honorarium dan Vakasi dengan dana sebesar Rp 1.957.408.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 94,66%

43. Operasional Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Operasional Perkantoran dengan dana sebesar Rp 1.393.930.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 90,75%

44. Dokumen Program dan Anggaran serta Laporan Evaluasi dan Keuangan

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen Program dan Anggaran serta Laporan Evaluasi dan Keuangan dengan dana sebesar Rp 92.908.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 93,93%

45. Diklat Teknis SDM Fungsional

Penyelenggaraan kegiatan Diklat Teknis SDM Fungsional dengan dana sebesar Rp 12.000.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 88,17%

46. Pembelian Kendaraan Roda Dua

Penyelenggaraan kegiatan Pembelian Kendaraan Roda Dua dengan dana sebesar Rp 107.750.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

47. Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Penyelenggaraan kegiatan Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp 92.309.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,99%

48. Pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

49. Pembelian Tanah

Penyelenggaraan kegiatan Pembelian Tanah dengan dana sebesar Rp 216.000.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

50. Pembuatan Akta Tanah Jual Beli dan Sertifikat

Penyelenggaraan kegiatan Pembuatan Akta Tanah Jual Beli dan Sertifikat dengan dana sebesar Rp

19.500.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 100%

51. Pengadaan Bangunan

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Bangunan dengan dana sebesar Rp 977.987.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 97,84%

52. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang

Penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang dengan dana sebesar Rp 83.598.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 97,48%

6.3.4 Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Balai Pelatihan Pertanian Jambi pada Tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam bagian anggaran DIPA Tahun 2013 Provinsi Jambi, dengan nilai sebesar Rp23.728.346.200,00 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Aparatur yang mengikuti Pelatihan teknis Pertanian dengan Terlaksananya kegiatan Diklat Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian sesuai dengan yang direncanakan yang mana alokasi peserta diklat adalah wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Yaitu Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan

Riau dan Jambi dengan anggaran sebesar 7.425.023.000,- terealisasi 93,94 %

2. Program Non Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian dengan outcome Terlaksananya kegiatan Diklat Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian sesuai dengan yang direncanakan yang mana alokasi peserta diklat adalah wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Yaitu Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jambi dengan anggaran sebesar Rp 1.865.095.000,- terealisasi 90,17 %
3. Program Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan outcome terlaksananya kegiatan kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan yaitu pembinaan dan pendampingan tenant, akreditasi program pelatihan dan standart penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ISO, sesuai dengan perencanaan dengan anggaran sebesar Rp 155.286.000,- terealisasi 84,65 %
4. Program Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan outcome Widyaiswara maupun petugas teknis di Balai Pelatihan pertanian telah melaksanakan magang, study banding, inhouse traning dan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan pelayanan dengan anggaran sebesar Rp 436.100.000,- terealisasi 78,37 %

5. Program Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi outcome terlaksananya kegiatan kelembagaan petani yang difasilitasi dan klasifikasi sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan anggaran sebesar Rp , - terealisasi 98,65 %
6. Program Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian outcome Terlaksananya kegiatan Diklat fungsional Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian sesuai dengan yang direncanakan yang mana alokasi peserta diklat adalah wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Yaitu Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jambi dengan anggaran sebesar Rp 1.170.870.000,- terealisasi 95,07 %
7. Program Non Aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian outcome Terlaksananya kegiatan Diklat Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan manajemen dan kewirausahaan Pertanian sesuai dengan yang direncanakan yang mana alokasi peserta diklat adalah wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi Yaitu Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jambi dengan anggaran Rp 390.600.000,- terealisasi 76,94 %
8. Program Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian yang dihasilkan outcome terlaksananya penyusunan rencana anggaran

kerja, tersusunnya anggaran dan jejaring kerjasama sesuai dengan yang direncanakan dengan anggaran Rp134.153.000,- terealisasi 83,04 %

9. Program Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang dihasilkan outcome Tertata rapinya pengadministrasian kegiatan Balai Pelatihan Pertanian Jambi dengan anggaran Rp 283.925.000,- terealisasi 90,05 %
10. Program Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan outcome pelaksana kegiatan Dokumen Evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan terlaksana dengan baik dengan anggaran Rp 30.336.200,- terealisasi 85,67 %
11. Program Layanan Perkantoran outcome Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 bulan dengan anggaran Rp 5.759.759.000,- terealisasi 92,56 %
12. Program Perangkat pengolah data dan komunikasi outcome terlaksananya kegiatan pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan proses belajar mengajar di Balai Pelatihan Pertanian Jambi dengan anggaran Rp 99.308.000,- terealisasi 89,57 %
13. Program Peralatan dan fasilitasi perkantoran outcome Terlaksananya kegiatan pengadaan

peralatan perkantoran untuk memenuhi kelengkapan lembaga sesuai standar yang ditetapkan berupa peralatan trafo dan meubelair demi terlaksananya penyelenggaraan pelatihan yang lancar dan baik pagu yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp 375.766.000,- terealisasi 89,37 %

14. Program Gedung/Bangunan dengan outcome meningkatkan mutu sarana dan prasarana diklat melalui rehap dan pembangunan baik gedung maupun fasilitas lainnya kegiatan ini dengan pembiayaan sebesar Rp 5.384.125.000,- terealisasi 64,10 %

6.3.5 Pengadilan Tinggi Jambi

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Pengadilan Tinggi Jambi pada Tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam bagian anggaran, dengan nilai sebesar Rp17.543.771.000,00 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi adalah sebesar Rp.14.604.371.000,00 dan pencapaian realisasi

anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 15.668.023.217,00 atau sebesar 107,28%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebesar Rp.2.600.000.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp.2.422.117.000,00 atau sebesar 93,16%

3. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Umum

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan program peningkatan manajemen pengadilan umum adalah sebesar Rp.339.400.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 277.261.800,00 atau sebesar 81,69%.

6.3.6 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi pada Tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam bagian anggaran DIPA Tahun 2013 Sumber Daya Alam Jambi pada satu program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam outcome Terwujudnya pengembangan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam lingkup Balai KSDA Jambi sesuai dengan pembangunan kehutanan bidang PHKA

Anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebesar Rp. 26.631.569.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 22.010.991.800,00 atau sebesar 82,65%.

6.3.7 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi

Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Provinsi Jambi pada Tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam bagian anggaran DIPA Tahun 2013 BPS Provinsi Jambi, dengan nilai sebesar Rp11.412.694.000,00 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS outcome terwujudnya good governance dan clean government dengan anggaran sebesar Rp.4.941.026.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 4.833.805.736,00 atau sebesar 97,83%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

dengan anggaran sebesar Rp136.000.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp.135.088.800,00 atau sebesar 99,33%.

3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan anggaran sebesar Rp.6.335.668.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 5.766.091.447,00 atau sebesar 91,01%.

6.3.8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi untuk tahun 2013 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dengan anggaran sebesar Rp 12.563.266,000,00 p kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dengan dana

sebesar Rp.3.208.403.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.908.096.479,00 atau 90,64%, dengan hasil yang dicapai berupa terselenggaranya layanan sertifikasi KP dan pengawasan keamanan hayati hewani dan hayati nabati.

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknis

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Peralatan Teknis dengan dana sebesar Rp.3.545.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.465.237.500,00 atau 97,75%, dengan hasil yang dicapai yaitu Berfungsinya laboratorium BKP Jambi dengan baik

3) Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp.4.299.113.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.055.353.292,00 atau 94,33%, dengan hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan pemeliharaan perkantoran dan rumah tangga kantor.

4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor dengan dana sebesar Rp.340.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.

320.090.400,00 atau 91,98%, dengan hasil yang dicapai yaitu tersedianya fasilitas kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2 unit.

5) Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp.177.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 162.840.000,00 atau 99,21%, dengan hasil yang dicapai yaitu terlaksananya alat pengolah data dan komunikasi untuk menunjang operasional kegiatan

6) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp.262.770.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 251.234.397,00 atau 95,61%. Dengan hasil yang dicapai terlaksananya perangkat dan peralatan fasilitas perkantoran

7) Kegiatan Pembangunan Gedung/bangunan

Penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Gedung/bangunan dengan dana sebesar Rp.722.980.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 706.929.844,00 atau 97,78%, dengan hasil

yang dicapai yaitu tersedianya fasilitas pembangunan gedung laboratorium dan instalasi.

6.3.9 PT. PLN (Persero) Provinsi Jambi

PT. PLN (PERSERO) Provinsi Jambi untuk tahun 2013 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana & Prasarana Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi Ketenagalistrikan dengan dana sebesar Rp. 70.801.684.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.70.097.288.261,00 atau sebesar 99,01%. Pelaksanaan program ini terdiri atas 3 kegiatan yang masing-masing terdiri dari :

1. Kegiatan Pembangunan Gardu Induk/Distribusi dengan alokasi dana sebesar Rp.8.701.399.000,00 dan realisasi mencapai Rp.8.657.475.675,00 atau 99,50%.
2. Kegiatan Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), dengan dana sebesar Rp.45.636.922.000,00 dan realisasi mencapai Rp.45.589.375.240,00 atau sebesar 99,90%.
3. Kegiatan Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR), dengan dana sebesar Rp.14.398.363.000,00 dan realisasi mencapai Rp.14.383.979.346,00 atau sebesar 99,90%.

4. Kegiatan Pro Rakyat (Listrik Murah dan Hemat dengan dana sebesar Rp.2.065.000.000,00 dan realisasi mencapai Rp.1.466.458.000,00 atau 71,011%.

6.3.10 BKKBN Provinsi Jambi

BKKBN Provinsi Jambi untuk tahun 2013 pelaksanaan pembangunan dengan program Pengelolaan Pembangunan Kependudukan anggaran sebesar Rp. 31.254.342.000,- dan realisasi pencapaian Rp 28.424.588.888,00 atau 90,95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rancangan Induk pengendalian Penduduk Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Rancangan Induk pengendalian Penduduk Provinsi dengan dana sebesar Rp.978.670.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.958.879.000,00 atau 97,97%. Dengan hasil yang dicapai/outcome diketahuinya arah dan kebijakan pembangunan KKB s.d Tahun 2035

2. Kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.5.105.225.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.3.819.529.963,00 atau 74,81%. Dengan hasil yang dicapai/outcome meningkatnya kesertaan ber-KB di klinik KB Pemerintah dan swasta

3. Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi dengan dana sebesar Rp.3.927.022.000,00 Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.3.382.633.450,00 atau 86,13%, dengan hasil yang dicapai/outcome yaitu terbinanya keluarga yang mempunyai anak balita/remadalam kelompok kegiatan tersebut

4. Kegiatan Advokasi dan Penggerakan Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Advokasi dan Penggerakan Provinsi dengan dana sebesar Rp. 2.427.825.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.083.512.000,00 atau 82,82% dengan hasil yang dicapai/outcome dilaksanakannya advokasi dan penggerakan program di lini lapangan terutama keluarga dan masyarakat.

5. Kegiatan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.308.354.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.277.887.000,00 atau 90,12% dengan hasil yang dicapai/outcome dilakukannya advokasi program KKB bagi stakeholder dan mitra kerja.

6. Kegiatan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.1.625.575.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.619.241.000,00 atau 99,6120% dengan hasil yang dicapai/outcome tersedianya data informasi program KKB yang akurat dan terpercaya.

7. Kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih Provinsi dengan dana sebesar Rp.1.992.649.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.803.837.500,00 atau 93,82% dengan hasil yang dicapai/outcomemeningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan SDM program KKB.

8. Kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.903.831.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.677.510.775,00 atau 74,96% dengan hasil yang dicapai/outcome tersedianya data dan informasi hasil penelitian program KKB.

9. Kegiatan Dukungan Manajemen BKKBN Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen BKKBN Provinsi dengan dana sebesar Rp.915.387.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.844.289.600,00 atau 92,23% dengan hasil yang dicapai/outcome

dampaknya hasil pelaksanaan dukungan manajemen.

10. Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kependudukan dan KB

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kependudukan dan KB dengan dana sebesar Rp.1.707.609.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.688.907.017,00 atau 98,90% dengan hasil yang dicapai/outcome diketahuinya hasil pelaksanaan monev program KKB.

11. Kegiatan PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional

Penyelenggaraan kegiatan PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional dengan dana sebesar Rp.1.349.114.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.330.940.000,00 atau 98,65% dengan hasil yang dicapai/outcome tersedianya dukungan operasional bagi penggerak program KKB di lini lapangan.

12. Kegiatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan

Penyelenggaraan kegiatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan dengan dana sebesar Rp.649.858.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.638.594.600,00 atau 98,27% dengan hasil yang

dicapai/outcome terjalannya kerjasama dengan mitra kerja untuk pencapaian program KKB.

13. Kegiatan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp.8.139.073.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.8.027.838.145,00 atau 98,63% dengan hasil yang dicapai/outcome terdapatnya hasil layanan perkantoran.

14. Kegiatan Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan kegiatan Kendaraan Bermotor dengan dana sebesar Rp.253.840.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.238.420.000,00 atau 93,93% dengan hasil yang dicapai/outcome terdapatnya hasil pembangunan program KKB tahun 2013.

15. Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Penyelenggaraan kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp.62.450.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.62.150.000,00 atau 99,52% dengan hasil yang dicapai/outcome terdapatnya hasil perangkat pengolah data dan komunikasi.

16. Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar

Rp.406.050.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.401.163.450,00 atau 98,80% dengan hasil yang dicapai/outcome terdapatnya hasil pembangunan program KKB tahun 2013.

17. Kegiatan Gedung dan Bangunan

Penyelenggaraan kegiatan Gedung dan Bangunan dengan dana sebesar Rp.571.810.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.569.255.000,00 atau 99,55% dengan hasil yang dicapai/outcome terdapat terdapatnya hasil pembangunan program KKB tahun 2013.

6.3.11 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jambi

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jambi tahun 2013 pelaksanaan pembangunan dibidang penyiaran dengan anggaran sebesar Rp 14,359.285.000,- dengan 2 Program kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 8.382.731.000,- dan realisasi capaian Rp 7.769.115.090,- atau 92,68 % terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Tahun 2013

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Tahun 2013 dengan anggaran

sebesar Rp. 8.073.065.000,- dan realisasi pencapaian Rp 7.769.115.090,00 atau 86,91 % dengan hasil yang dicapai/outcome diketahuinya hasil pelaksanaan layanan perkantoran tahun 2013

2. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tahun 2013

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp 309.666.000,- dan realisasi capaian Rp 304.897.144,00 atau 98,46% dengan hasil yang dicapai/outcome diketahuinya hasil penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan tahun 2013

2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Pub dengan anggaran sebesar Rp 5.976.554.000,00 dan realisasi capaian Rp 5.950.854.817,00 atau 99,57% terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Peralatan Pemancar dan Peralatan Studio

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Peralatan Pemancar dan Peralatan Studio dengan anggaran sebesar Rp 4.129.973.000,00 dan realisasi capaian Rp 4.122.539.048,00 atau 88,82% dengan hasil yang dicapai/outcome diketahuinya hasil pelaksanaan pengadaan peralatan pemancar dan peralatan studio

2. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Layanan publikasi dan Pengembangan Usaha

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Layanan publikasi dan Pengembangan Usaha dengan anggaran sebesar Rp 665.275.000,00 dan realisasi capaian Rp 658.755.305,00 atau 99,02% dengan hasil yang dicapai/outcome diketahuinya hasil pelaksanaan promosi, layanan publik dan pengembangan usaha studio

3. Kegiatan Penyelenggaraan Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp 1.181.306.000,00 dan realisasi capaian Rp 1.180.006.563,00 atau 99,89% dengan hasil yang dicapai/outcome diketahuinya pelaksanaan Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional.

6.3.12 Kejaksan Tinggi Jambi

Kejaksan Tinggi Jambi untuk tahun 2013 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksan RI,
penyelenggaraan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan dana

sebesar Rp 44.858.035,00 pencapaian realisasi Rp 44.405.671.967,00 atau 99,01%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kejaksanaan RI

Penyelenggaraan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI dengan dana sebesar Rp.8.534.029.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.8.369.273.000,00 atau 98,07%.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan RI

Penyelenggaraan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI dengan dana sebesar Rp.560.206.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.247.376.250,00 atau 44,16%.

4. Program Penyelidikan/Pengamanan Panggalangan
Kasus Intelijen

Penyelenggaraan Program Penyelidikan/Pengamanan Panggalangan Kasus Intelijen dengan dana sebesar Rp.3.219.360.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.656.670.000,00 atau 82,49%.

5. Program Penanganan Penyelesaian Perkara Pidana
Umum

Penyelenggaraan Program Penanganan Penyelesaian Perkara Pidana Umum dengan dana sebesar

Rp.6.600.775.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.374.659.560,00 atau 81,42%.

6. Program Penanganan Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM dan Korupsi

Penyelenggaraan Program Penanganan Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM dan Korupsi dengan dana sebesar Rp.9.893.340.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.6.568.759.000,00 atau 65,80%.

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Penyelenggaraan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan dana sebesar Rp.690.340.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.441.840.000,00 atau 64%.

6.3.13 Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat untuk tahun 2013 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan dan Umum

Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Keuangan dan Umum dengan dana sebesar Rp 79.700.00,00 pencapaian realisasi keuangan 100% dengan

hasil yang dicapai/outcome tersusunnya laporan keuangan dan umum.

2. Dokumen Program dan Anggaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Penyelenggaraan Kegiatan Dokumen Program dan Anggaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan dengan dana sebesar Rp 104.500.000,00 pencapaian realisasi keuangan 96,17%, dengan hasil yang dicapai/outcome tersusunnya dokumen program dan anggaran/data dan informasi/konitoring dan evaluasi, meningkatnta pelaksanaan kerja yang terkoordinir efektif dan terarah

3. Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dengan dana sebesar Rp 109.952.000,00 pencapaian realisasi keuangan 99,09%, dengan hasil yang dicapai/outcome tersedianya bahan dan informasi terbaru mengenai pemanfaatan jasa lingkungan di TNKS

4. Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam

Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam dengan dana sebesar Rp 125.140.000,00 pencapaian realisasi keuangan 100%, dengan

hasil yang dicapai/outcome pengelolaan obyek wisata yang ada di TNKS dapat terlaksana dengan baik

5. Laporan Pembentukan/Pembinaan Kader Konservasi dan Kelompok Pecinta Alam

Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Pembentukan/Pembinaan Kader Konservasi dan Kelompok Pecinta Alam dengan dana sebesar Rp 488.200.000,00 pencapaian realisasi keuangan 100%, dengan hasil yang dicapai/outcome meningkatnya jumlah dan tingkat partisipasi generasi muda dalam melestarikan kawasan TNKS

6. Lokasi Penanganan Konflik dan Tekanan pada Kawasan Taman Nasional

Penyelenggaraan Kegiatan Lokasi Penanganan Konflik dan Tekanan pada Kawasan Taman Nasional dengan dana sebesar Rp 2.991.085.000,00 pencapaian realisasi keuangan 92,16%, dengan hasil yang dicapai/outcome gangguan keamanan terhadap kawasan menurun dan meningkatnya persentase kasus yang tertangani, menurunnya persentase perambahan di dalam kawasan TNKS

7. Lokasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Esensial

Penyelenggaraan Kegiatan Lokasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Esensial dengan dana sebesar Rp 846.890.000,00 pencapaian realisasi

keuangan 93,51%, dengan hasil yang dicapai/outcome tersedianya data alokasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial

8. Laporan Perkembangan Spesies Terancam Punah Prioritas

Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Perkembangan Spesies Terancam Punah Prioritas dengan dana sebesar Rp 911.500.000,00 pencapaian realisasi keuangan 99,64%, data hasil inventarisasi dapat dijadikan bahan pengembangan pengelolaan flora dan fauna jumlah konflik satwa – manusia yang berhasil ditangani

9. Laporan Pencegahan, Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan

Penyelenggaraan Kegiatan de Laporan Pencegahan, Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan ngan dana sebesar Rp 1.306.400.000,00 pencapaian realisasi keuangan 97,30%, dengan hasil yang dicapai/outcome menurunnya jumlah dan tertanganinya kebakaran hutan

10. Laporan Pengamanan Kawasan Taman Nasional

Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Pengamanan Kawasan Taman Nasional dengan dana sebesar Rp 1.867.500.000,00 pencapaian realisasi keuangan 87,86%, dengan hasil yang

dicapai/outcome menurunnya gangguan terhadap kawasan TNKS

11. Inventarisasi Jenis Kelompok Mamalia Daratan Yang Dilindungi

Penyelenggaraan Kegiatan Inventarisasi Jenis Kelompok Mamalia Daratan Yang Dilindungi dengan dana sebesar Rp 277.500.000,00 pencapaian realisasi keuangan 100%, dengan hasil yang dicapai/outcome tersedianya data jenis kelompok mamalia daratan yang dilindungi

12. Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp 12.447.948.000,00 pencapaian realisasi keuangan 95.10%, dengan hasil yang dicapai/outcome meningkatnya motivasi dan profesionalisme kerja, terpenuhinya semua kebutuhan operasional perkantoran

13. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Penyelenggaraan Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp 232.000.000,00 pencapaian realisasi keuangan 83,97%, dengan hasil yang dicapai/

14. outcome tersedianya perangkat pengolah data dan informasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

15. Penyelenggaraan Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp 286.100.000,00 pencapaian realisasi keuangan 85,67%, dengan hasil yang dicapai/outcome tersedianya peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan TNKS

16. Pengadaan Gudang/Bangunan

Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Gudang/Bangunan dengan dana sebesar Rp 679.241.000,00 pencapaian realisasi keuangan 64,17%, dengan hasil yang dicapai/outcome berfungsinya sarana prasarana yang disediakan dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan TNKS

6.4 Pembinaan Batas Wilayah

Penegasan batas daerah sangat penting dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Apabila tidak adanya batas daerah yang jelas dan pasti baik secara yuridis maupun secara fisik di lapangan, suatu daerah tidak dapat merencanakan, melaksanakan bahkan dalam mengawasi pelaksanaan suatu kegiatan dengan baik. Kewenangan penegasan batas daerah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri, sebagaimana ditegaskan pada pasal 19 ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa "Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri".

Tahapan pelaksanaan penegasan batas daerah di darat, sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pular batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas daerah di laut dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar titik acuan, penentuan titik awal dan garis dasar, pengukuran dan penentuan batas, serta pembuatan peta batas.

Tabel 5.1 Pelaksanaan Penegasan Batas Provinsi Jambi Dengan Provinsi Tetangga Tahun 2013

NO	SEGMENT BATAS PROVINSI	PANJANG (KM)	TARGET (KM)	REALISASI (KM)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	Jambi-Sumsel	539	539	539	100	Proses penyiapan dokumen batas
2	Jambi-Bengkulu	128	128	128	100	Permendagri Nomor 25 Tahun 2013
3	Jambi-Sumbar	258,5	258,5	133	51,45	Khusus batas Kab. Bungo dan Tebo dengan Kab. Dharmasraya
4	Jambi-Riau	276	276	276	100	Permendagri Nomor 33 Tahun 2013
5	Jambi-Kep. Riau	-	-	-	-	Belum penegasan Batas Laut
	JUMLAH (KM)	1.201,5	1.201,5	1.076	-	-

Sumber: Biro Pemerintahan, tahun 2013

1. Realisasi Pelaksanaan Antar Wilayah Provinsi

Provinsi Jambi memiliki 5 (lima) segmen batas dengan Provinsi tetangga yaitu 4 (empat) segmen batas di darat sepanjang 1.201,5 km meliputi segmen batas Jambi – Bengkulu 128 km, Jambi – Riau 276 km, Jambi – Sumbar 258,5 km, dan segmen batas Jambi – Sumsel 539 km, seluruhnya telah dilaksanakan pelacakan dan pengukuran di lapangan.

Sedangkan 1 (satu) segmen batas di laut yaitu batas dengan Provinsi Kepulauan Riau setelah proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi RI mengenai kepemilikan Pulau Berhala belum dilakukan penegasan batas laut.

Adapun proses penyelesaian batas antar Provinsi Jambi yang telah dilakukan meliputi:

a. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu.

Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2013, dengan demikian tidak ada persoalan lagi mengenai batas kedua provinsi.

b. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau.

Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2013, dengan demikian tidak ada persoalan lagi mengenai batas kedua provinsi.

c. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan di lapangan dimulai sejak tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 2003. Segmen batas dimaksud seluruhnya sepanjang 539 km, dimulai dari simpul segitiga batas daerah antara Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di puncak Bukit Hulu Kulus sampai dengan batas daerah antara Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Barat di Muara Sungai Benuh, Pinggir pantai Timur dan hasilnya telah disepakati ke dua Gubernur. Proses pengukuran seluruh segmen batas telah

selesai dilaksanakan, dan laporan yang disertai dengan dokumen dan peta segmen sepanjang 202 km telah diselesaikan. Sementara itu sisa segmen sepanjang 337 km telah dibuat laporannya namun dokumen dan peta sedang dalam proses penyelesaian.

d. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat.

Segmen batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 258,5 km, dilaksanakan penegasannya di lapangan mulai tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2003 yang dimulai dari dimulai dari simpul segitiga batas daerah antara Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat di puncak Bukit Mentango sampai dengan titik simpul segitiga batas daerah antara Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, terletak di kebun Kelapa Sawit milik PT. SAK di Muara Timpeh.

Progres penegasan batas sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan tokoh masyarakat Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Walinagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat bersepakat bahwa:
 - Batas kedua daerah pada jalan lintas Sumatera berada di lokasi bangunan gerbang (gapura) selamat datang/ selamat jalan Provinsi Jambi dengan koordinat 010 14' 01,5" LS dan 1010 44' 23,6" BT (di Batu Elang)

- Sebelah kiri jalan lintas Sumatera dari Padang (arah ke Timur) sampai Transmigrasi Blok B Sitiung II, lahan yang diolah oleh masyarakat Sumbar menjadi wilayah Sumatera Barat, sedangkan tanah yang diolah oleh masyarakat Provinsi Jambi masuk ke wilayah Provinsi Jambi.

b. Tim penegasan batas Provinsi Jambi dan tim penegasan batas Kabupaten Bungo telah melakukan pelacakan titik batas di lapangan :

- Perhentian Teleng (PBU 12/APBN 2012) menuju ke simpul batas Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya di Hulu Gunung Jujuhan.
- Jalan Lintas Sumatera ke arah Timur sampai ke simpul batas Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya, dekat Muara Sungai Timpe.

e. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Lingga) yang merupakan batas di laut belum dilaksanakan penegasannya, setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi RI memutuskan bahwa Pulau Berhala masuk dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Antar Wilayah Kabupaten/Kota

Terkait dengan Penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi (Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi) pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Penegasan Batas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2013

NO	SEGMENT BATAS KABUPATEN/KOTA	PANJANG (KM)	REALISASI s.d TH 2013 (km)
1	Tanjabbar - Batanghari	72	70
2	Tanjabbar - Tebo	42,6	42,6
3	Sarolangun- Tebo	5	5
4	Bungo - Merangin	156,56	156,56
5	Merangin - Kerinci	105,7	105,7
6	Bungo - Tebo	138,5	92
7	Batanghari- Ma. Jambi	156	126
8	Tanjabbar - Tanjabtim	66	63,75
9	Muaro Jambi - Kota Jambi	70,4	70,4
10	Muaro Jambi - Tanjab Timur	160	150
11	Muaro Jambi - Tanjab Barat	44	44
12	Tebo - Batanghari	85	75
13	Batanghari - Sarolangun	128	128
14	Merangin - Sarolangun	188,54	188,54
15	Merangin - Tebo	55,3	55,3
16	Bungo - Kerinci	33	0
17	Bungo - tebo	138,5	92
18	Kerinci - Sei Penuh	130	28

6.5 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pengertian tersebut terdapat didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari Pembangunan Nasional yang merupakan

serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum (prabencana), pada saat tanggap darurat, maupun sesudah terjadi bencana (pasca bencana). Melalui perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik dimaksudkan dapat memberi landasan hukum yang kuat dalam merumuskan kegiatan kebencanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga diperoleh hasil optimal dalam melaksanakan aksi pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Sebab itu Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara $0^{\circ} 47'$ Lintang Utara – $2^{\circ} 46,16'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 12' - 104^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat $53.435,92 \text{ Km}^2$ yang terbagi atas luas daratan $48.989,98 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $4.445,94 \text{ Km}^2$ serta dengan panjang garis pantai $223,025 \text{ km}$ (*Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi Tahun 2013-2033*) berpenduduk 3.169.814 jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 131 Kecamatan dan 1.238 Desa dan 148 Kelurahan.

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut (m dpl) di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat kontur lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan

pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

Ditinjau dari kesatuan Hidrologi maka hampir seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari yang menempatkan Provinsi Jambi sebagai daerah yang sangat rawan terkena Bencana Banjir. Disamping itu, kondisi topografi Wilayah barat Provinsi Jambi yang secara umum berada pada kawasan bukit barisan yang dilewati oleh patahan patahan kerak bumi menjadikan wilayah ini sangatlah rentan terhadap pergerakan lapisan tanah akibat aktivitas tektonik yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dan tanah longsor. disamping itu keberadaan gunung kerinci dan aktivitas vulkaniknya di wilayah barat provinsi jambi juga berdampak kepada peluang terjadinya gempa bumi dan tanah longsor yang senantiasa dapat terjadi kapan saja di wilayah barat provinsi jambio. Adapun daerah daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan gempa bumi dan tanah longsor dari wilayah paling barat yaitu daerah sekitar gunung Kerinci, daerah sungai batu gantih, daerah pungut Mudik, sebelah Timur Bukit Pandan, Pulau Sangkar. Bergeser kearah hilir kabupaten kerinci tepatnya di perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin juga terdapat daerah yang rawan longsor yaitu Lintasan Danau Daerah Pondan Lapanggar, Lubuk Telung sebelah timur Bukit Sungai Kuyut. Sedangkan di Kabupaten Merangin daerah rawan longsor terdapat di daerah Bukit Maras, Bukit Pungung, Bukit Telanti dan Sikuncing.

Selain bencana alam, seperti gempa, banjir dan tanah longsor, Provinsi Jambi berpotensi terhadap bencana sosial seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, wabah penyakit dan kerusuhan sosial.

Dalam penanggulangan bencana, masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara. Hal-hal tersebut akan dapat berjalan baik dengan terbentuknya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dari instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Pada saat terjadinya bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sehubungan hal tersebut diatas dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta mengintegrasikan program kegiatan untuk penanggulangan bencana Provinsi Jambi telah membentuk badan yang mengkoordinir tentang bencana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi Tanggal 10 Agustus 2009 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Yang mana

keberadaannya menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, membangun sistim penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

6.6 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

b. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun anggaran 2013 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp5.815.184.000,00 yang digunakan untuk membiayai delapan program yang meliputi 29 kegiatan. Program – program tersebut adalah pelayanan administrasi perkantoran (sembilan kegiatan), peningkatan disiplin aparatur (satu kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (enam kegiatan), program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (satu

kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (empat kegiatan), program pemeliharaan kantrantibmas dan tindakan kriminal (enam kegiatan) dan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp5.137.366.430,00 atau sebesar 88,34%.

c. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam penanggulangan masalah gangguan yang terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separitisme) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi melakukan berbagai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan antisipasi dini serta melakukan pengamanan setiap aksi unjuk rasa/demonstrasi yang terjadi.
2. Memfasilitasi setiap menyampaikan aspirasi pendemo.
3. Terhadap gangguan trantib seperti gelandangan, dan PKL telah dilakukan penertiban-penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Gangguan yang disebabkan Penyakit Masyarakat (PEKAT) telah dilakukan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.

d. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam setiap penanganan aksi unjuk rasa/demonstrasi, dilakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terutama kepolisian RI. Selain itu, koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian juga dilakukan dalam penyuluhan dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT).

BAB VII

PENUTUP